



LAPORAN KINERA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-IV pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, Januari 2024

**Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Hasil ringkasan pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang dihasilkan di tahun 2023, dapat disimpulkan capaian kinerja rata-rata sebesar **97,29%** dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian **Sangat Berhasil**, sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KRETERIA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	97,62%	Sangat Baik
2.	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	101,84	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	104%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	100%	Sangat Baik

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Sumenep ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis.....	7
2.2. Rencana Kinerja Tahun	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2. Realisasi Anggaran	52
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56
BAB IV PENUTUP	64
Lampiran :	
1. SK. Tim Sakip Perangkat Daerah	
2. Matriks Renstra	
3. Sk Penetapan Indikator Kinerja Utama	
4. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep
2. Mendorong BAPPEDA Kabupaten Sumenep di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

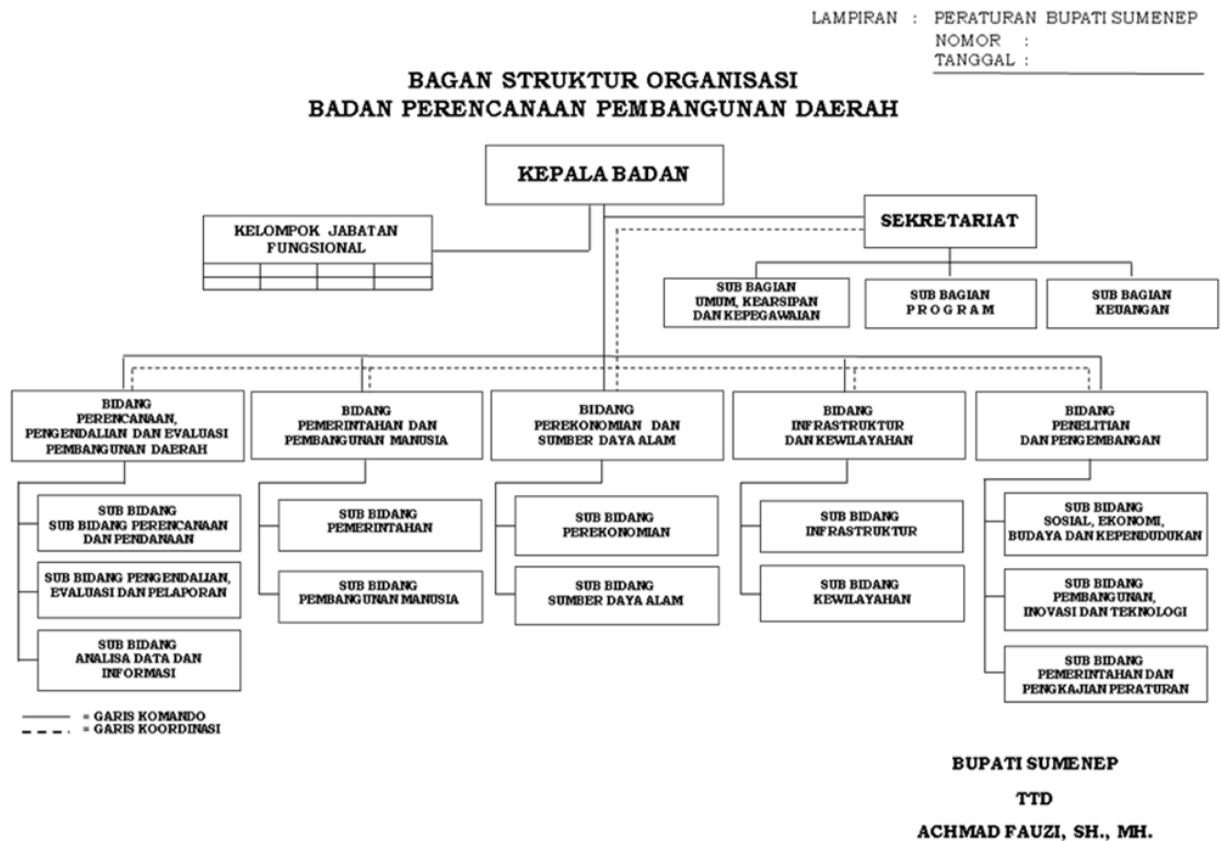
- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, Bappeda Kabupaten Sumenep masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Bappeda berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang andal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*)

dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government.

Adapun susunan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep



1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berbagai isu strategis berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Penentuan isu-isu strategis, terlebih dahulu melalui identifikasi permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga permasalahan tersebut dapat dikontrol oleh Perangkat Daerah. Hal ini karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	1. Keselarasan dan konsistensi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah antar perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2.	Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	
3.	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	

1.4. Landasan Hukum

1. Laporan Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;

7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan

antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke empat. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Sumenep yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep, maka Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yakni: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.

UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

MANDIRI

Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

SEJAHTERA

Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel : 2.1.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2021 - 2026
Visi: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1 Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Pengeluaran Perkapita
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Prosentase Penduduk Miskin	Menurunkan Kesenjangan	Indeks Gini
			Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)
				Pertumbuhan Ekonomi (%)
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Petumbuhan PAD
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
				PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovati	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE
				Nilai IKM
				Indeks Inovasi Daerah
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP
				Opini atas Audit BPK
4 Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal	Indeks Kesalahan Sosial	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Nilai Stabilitas Sosial
			Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	Nilai Solidaritas Sosial
			Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Gotong Royong
5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	Indeks Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda Kabupaten Sumenep berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: meningkatnya pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan indikator capaian sasaran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BAPPEDA Kabupaten Sumenep

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82%	84%	86%	88%	90%
1.2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%	87%	88%	89%	90%
2.	Meningkatkan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	50,88	51,38	51,88	52,38	52,88
2.1.		Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%	75%	75%	75%	75%

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BAPPEDA Kabupaten Sumenep

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formulasi
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	%	Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% capaian sasaran pemkab + 20% sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	$\frac{\text{Jumlah Prioritas yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh Prioritas Daerah}} \times 100\%$
1.2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	$\frac{\text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RKPD}}{\text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RPJMD}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	%	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Total = ISP + rata-rata Isi • Skor Total : Skor Total Maksimum X 100
2.1.		Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	$\frac{\text{Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah topik kajian dan penelitian}} \times 100\%$

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BAPPEDA Kabupaten Sumenep

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	%	92%
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	84%
1.2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	87%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
2.	Meningkatkan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	%	51,38
2.1.		Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi

pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	84%	IKU
2.	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	87%	IKU
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%	IKU
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	100%	IKU

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.3.2
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	7.664.949.609	8.257.471.893
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	11.727.100	11.727.100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	6.266.154.049	6.312.954.901
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN mengikuti pelatihan	10 ASN	1 Laporan	187.860.895	197.918.050

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	5 Jenis	5 Laporan	591.278.344	978.012.312
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan yang dibeli	2 Jenis	2 Laporan	46.495.569	27.805.187
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	3 Komponen	3 Laporan	232.884.550	232.884.550
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Jenis	1 Laporan	328.549.102	496.169.793
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	100%	100%	1.457.291.444	1.381.234.044
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	715.827.550	604.618.150
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	1 Data	1 Data	72.531.994	72.531.994
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	14 Laporan	14 Laporan	668.931.900	704.083.900
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	660.258.442	562.877.292
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	227.813.478	171.866.578
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2 Dokumen	2 Dokumen	200.434.188	141.962.188
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	232.010.776	249.048.526
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100%	100%	934.182.944	1.075.939.754
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	2 Laporan	2 Laporan	139.820.497	164.820.497
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	7 Kajian	12 Kajian	457.361.000	807.361.000
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	2 Kajian	2 Kajian	151.350.000	151.350.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	2 Laporan	2 Laporan	185.651.447	22.565.447

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BAPPEDA Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. BAPPEDA Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Bappeda Kabupaten Sumenep pelaksanaan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan

membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATAGORI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	84	82	97,62	Sangat Baik	Bidang Dalev
2.	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	87	88,6	101,84	Sangat Baik	Bidang Ddalev
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	78	104	Sangat Baik	Bidang Litbang
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100	Sangat Baik	Sekretariat

Uraian Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai. Indikator tersebut diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2023. Dari 33 indikator yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan, terdapat 27 indikator yang capaiannya sesuai/melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut kemudian diukur melalui formulasi berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah prioritas yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh prioritas daerah}} \times 100\% = \frac{27}{33} \times 100\% = 82\%$$

maka capaian kinerja % Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai tahun 2023 adalah $\frac{82}{84} \times 100\% = 97,62\%$

Hal ini disebabkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 dari 33 indikator terdapat 6 indikator prioritas pembangunan daerah capaiannya masih kurang dari 100% pada tabel sebagai berikut:

NO	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kesehatan	Indeks Pendidikan	0,588	0,575	(98%)
		Indeks Kesehatan	0,803	0,8948	111%
2	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;	Padi	5,38	5,9	110%
		Jagung	3,07	3,14	102%
		Kedelai	1,39	1,45	104%
		Kacang Hijau	1,36	1,42	104%
		Ubi Kayu	15,11	15,11	100%
		Bawang Merah	72,49	74,08	102%
		Cabai Besar	41,23	44,88	109%
		Cabai Kecil	42,93	45,07	105%
		Tembakau	0,66	0,7	106%
		Kelapa	1,24	1,27	102%
		Jambu Mete	0,61	0,65	107%
		Cabe Jamu	4,77	4,47	(94%)
		Siwalan	0,17	0,17	100%
		Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	7	16,24	232%
Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	15	15,69	105%		
3	Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja Dan Perluasan Akses Terhadap Kesempatan Kerja Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,26	1,71	136%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,1	78,86	105%
		Pertumbuhan Ekonomi	3,7	5,79	156%
4	Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Penunjang Pengembangan Ekonomi Strategis, Aksesibilitas Antar Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Serta Dapat Mendukung Ketahanan Bencana;	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26	63,71	(96%)
		Indeks Infrastruktur	74	73,23	(99%)
		Indeks kualitas layanan infrastruktur	81	80,84	100%

NO	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
5	Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Even-Even Kebudayaan Sebagai Upaya Penguatan Kelestarian Budaya Lokal;	Indeks Kesalihan Sosial	81,46	83,36	102%
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0,28	0,21	(75%)
		Pengeluaran Perkapita	Rp9.623.729	Rp9.807.000	102%
		% Penduduk Miskin	18	18,7	104%
6	Peningkatan Kualitas Layanan Publik Yang Transparan, Responsif Dan Akuntabel.	Nilai SAKIP	73	68,61	(94%)
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	102%
		Indeks Profesionalisme Aparatur	3.100	3.161	126%
		Indeks SPBE	2,4	3,18	133%
		Indeks Reformasi Birokrasi	62,7	70,15	112%

- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yaitu Indeks Pendidikan mengalami penurunan 0,575 dari target 0,588 yang ditetapkan, maka capaian Indeks Kesehatan tahun 2023 tercapai sebesar 98%.
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu Cabe Jamu mengalami penurunan 4,47 dari target 4,47 yang ditetapkan, maka capaian Cabe Jamu tahun 2023 tercapai sebesar 94%.
- Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Penunjang Pengembangan Ekonomi Strategis, Aksesibilitas Antar Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Serta Dapat Mendukung Ketahanan Bencana yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan 63,71 dari target 66,26 yang ditetapkan, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 tercapai sebesar 96%, dan Indeks Infrastruktur mengalami penurunan 73,23 dari target 74 yang ditetapkan, maka capaian Indeks Infrastruktur tahun 2023 tercapai sebesar 96%.
- Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Even- Even Kebudayaan Sebagai Upaya Penguatan Kelestarian Budaya Lokal

yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD mengalami penurunan 0,21 dari target 0,28 yang ditetapkan, maka capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2023 tercapai sebesar 75%.

- Peningkatan Kualitas Layanan Publik Yang Transparan, Responsif Dan Akuntabel yaitu Nilai SAKIP mengalami penurunan 68,61 dari target 73 yang ditetapkan, maka capaian Nilai SAKIP tahun 2023 tercapai sebesar 94%.
2. Sasaran strategis *Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah* dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)*. Indikator tersebut digunakan untuk menghitung keselarasan antara RKPD dan RPJMD dengan cara membandingkan jumlah program, indikator dan target dalam RKPD yang sesuai dengan program, indikator dan target yang terdapat dalam RPJMD. Dari 307 program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD, terdapat 272 program yang indikator dan targetnya sesuai. Sehingga jika dihitung melalui rumusan dibawah ini :

$$= \frac{\text{jumlah program, indikator, target kinerja yang di RKPD}}{\text{jumlah program, indikator, target kinerja yang di RPJMD}} \times 100\% = \frac{272}{307} \times 100\% = 88,6\%$$

maka realisasi capaian kinerja *Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)* tahun 2023 adalah

$$= \frac{88,6}{87} \times 100\% = 101,84\%$$

Hal ini menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja yang didukung Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya menyelelarkan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Renstra, Renja OPD.

3. Sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah* dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu *Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan* susunan ukuran keberhasilan adalah

$$\frac{\text{jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah topik kajian dan penelitian}} \times 100\%$$

Jadi peningkatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan daerah realisasinya adalah $\frac{11 \text{ kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{14 \text{ topik kajian dan peneliti}} \times 100\% = 78\%$, maka ditargetkan tahun 2023 adalah $\frac{78}{75} \times 100 = 104\%$.

Hal ini menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja ditargetkan hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan sebesar 75% teralisasi sebesar 78% capaian kinerjanya yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 100% (sangat baik). Ini didukung program penelitian dan pengembangan daerah sebanyak 11 kajian diantaranya:

1. Kajian Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Ngaji di Kabupaten Sumenep
2. Pengembangan Produk Gula Siwalan Cair Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
3. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa di Kabupaten Sumenep.
4. Analisis Perencanaan Karis Siswa dalam menanggulangi Fenomena Putus Sekolah di Kabupaten Sumenep
5. Analisis Tipologi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) Kepulauan
6. Analisis Perencanaan Sub Sektor Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Sumenep.
7. Penyusunan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Sumenep.
8. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Sumenep.
9. Survey Preferensi Masyarakat Terhadap Aspek Sosial, Politik dan Ekonomi di Kabupaten Sumenep
10. Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Sumenep di Kecamatan Batuan
11. Survei Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Sedangkan jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang belum ditindaklanjuti dan masih berproses dalam jangka panjang pada tahun 2023 sebanyak 3 kajian diantaranya :

1. Kajian Nilai-Nilai Permainan Tradisional Dalam Upaya Meningkatkan Toleransi dan Gotong Royong di Kabupaten Sumenep
2. Analisis Tiga Tahun Pemerintah Kabupaten Sumenep : Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan
3. Penyusunan Indeks Kapasitas Organisasi di Kabupayen Sumenep

3.1.2. Realisasi Capaian Kinerja Perbandingan

Perbandingan Tahun 2022 dan Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2022–2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda apabila disandingkan dengan tahun, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASA	% CAPAIAN	TARGET	REALISASA	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82	82,76	100	84	82	97,62
2.	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	86	76,67	89,15	87	88,6	101,84
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	75	100	75	78	104
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100	100	100	100

Uraian Penjelasan Perbandingan Capaian Kinerja :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Target

Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 82% teralisasi 82,76% dengan yang capaian sebesar 100% dengan ini yang dihasilkan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 97,62% disebabkan pada tahun 2023 ada 33 mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

2. Sasaran Strategis Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja) ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 86% teralisasi sebesar 76,67%, maka rialisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 89,15%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan 307 program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD, terdapat 272 program yang indikator dan targetnya sesuai dengan capaian 101,84% menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja yang didukung Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya menyelelarkan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Renstra, Renja OPD.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan teralisasi pada tahun 2022 dari jumlah topik kajian dan penelitian sebanyak 16 teralisasi jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti sebanyak 12 kajian sebesar 75% dan tahun 2023 dari jumlah topik kajian dan penelitian sebanyak 14 teralisasi jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti sebanyak 11 kajian teralisasi sebesar 78%, maka perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dari sebesar 4%.

3.1.3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan

target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.3
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RIALISASI KINERJA TH. 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82	90	91
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	88,6	90	98,44
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	78	75	104
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100

Uraian Penjelasan Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai tahun 2023 teralisasi sebesar 82% dibandingkan dengan akhir RENSTRA sebesar 90% tingkat kemajuan sebesar 90% dari 33 prioritas pembangunan Kabupaten tercapai.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja) tahun 2023 teralisasi sebesar 88,6 dibandingkan dengan akhir RENSTRA sebesar 90% tingkat kemajuan sebesar 98,44% dari 307 program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD terdapat 272 program yang indikator target sesuai regulasi.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan tahun 2023 teralisasi sebesar 88,6 dibandingkan dengan akhir RENSTRA sebesar 90% tingkat kemajuan sebesar 98,44% dari 11 kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti 14 topik kajian dan peneliti.

3.1.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran dengan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran Bappeda dengan target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82	-	-
2.	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	88,6	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	78	-	-
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	-	-

Uraian Penjelasan Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain:

Berdasarkan tabel 3.1.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran BAPPEDA Kabupaten Sumenep tidak dapat disandingkan dengan dengan Standar Pelayanan Minimal atau Standar Nasional lainnya, karena BAPPEDA merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100	Berhasil	-
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	100	Berhasil	-
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	14	14	100	Berhasil	-
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	100	Berhasil	-
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.4	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.5	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.1.6	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Laporan	3	3	100	Berhasil	-
1.1.7	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Laporan	4	4	100	Berhasil	-
1.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	Dokumen	3	3	100	Berhasil	-
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS/ Bulan	54	54	100	Berhasil	-
1.2.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	laporan	1	1	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
		Keuangan Akhir Tahun SKPD						
1.2.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	2	2	100	Berhasil	-
1.3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah ASN yang Disiplin	ASN	54	54	100	Berhasil	-
1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100	Berhasil	-
1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100	Berhasil	-
1.4	<i>Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	Laporan	6	6	100	Berhasil	-
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	Berhasil	-
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	Berhasil	-
1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	Berhasil	-
1.4.4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100	Berhasil	-
1.4.5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	15	100	Berhasil	-
1.4.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	100	Berhasil	-
1.4.7	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
1.5	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	Laporan	1	1	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
	<i>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>							
1.5.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100	Berhasil	-
1.6	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Laporan	3	3	100	Berhasil	-
1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Laporan	3	3	100	Berhasil	-
1.7	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Laporan	1	1	100	Berhasil	-
1.7.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29	100	Berhasil	-
1.7.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	38	100	Berhasil	-
1.7.3	Sub kegiatan Pemeliharaan- Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100	Berhasil	-
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	72	82,39	87,39	Berhasil	-
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	%	100	100	100	Berhasil	-
2.1	<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Dokumen	3	3	100	Berhasil	-
2.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100	Berhasil	-
2.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
	Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
2.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100	Berhasil	-
2.1.4	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	135	135	100	Berhasil	-
2.1.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	Dokumen	3	3	100	Berhasil	-
2.2	<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
2.2.1	Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	51	51	100	Berhasil	-
2.2.2	Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100	Berhasil	-
2.3	<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	14	14	100	Berhasil	-
2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	13	13	100	Berhasil	-
2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	1	1	100	Berhasil	-
III	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (Program, Indikator,	%	88,6	99,35	89,18	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
		dan Target Kinerja)						
3	Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	Berhasil	-
3.1	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	4	4	100	Berhasil	-
3.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100	Berhasil	-
3.1.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.1.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	4	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
3.1.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	4	100	Berhasil	-
3.2	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.2.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	2	2	100	Berhasil	-
3.2.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	2	2	100	Berhasil	-
3.2.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.2.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	2	2	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
3.2.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	3	100	Berhasil	-
3.3	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100	Berhasil	-
3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah yang disusun	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
3.3.3	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	2	2	100	Berhasil	-
3.3.4	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	2	2	100	Berhasil	-
3.3.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
3.3.6	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	1	1	100	Berhasil	-
3.3.7	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	1	1	100	Berhasil	-
IV	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	78	100	Berhasil	-
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	Berhasil	-
4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	Laporan	2	2	100	Berhasil	-
4.1.1	Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	laporan	1	1	100	Berhasil	-
4.1.2	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	laporan	1	1	100	Berhasil	-
4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	Kajian	12	12	100	Berhasil	-
4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	5	5	100	Berhasil	-
4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	1	100	Berhasil	-
4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	6	6	100	Berhasil	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Satuan	Kinerja			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	% Capaian		
	Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Pengembangan Partisipasi Masyarakat						
4.3	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	Kajian	2	2	100	Berhasil	-
4.3.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	2	100	Berhasil	-
4.4	<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	Laporan	2	2	100	Berhasil	-
4.4.1	Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	laporan	1	1	100	Berhasil	-
4.4.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	1	1	100	Berhasil	-

Uraian Penjelasan Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi :

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, indikator Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai.

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

a. Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD kabupaten diawali dengan penyusunan dokumen ranwal RKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang dilaksanakan sejak Desember tahun 2022. Dokumen tersebut beserta Renstra PD akan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun renja PD. Penginputan program/kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan anggaran renja PD dilakukan melalui SIPD Kemendagri.

Sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (bottom up), dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang diawali dari level desa/kelurahan yang dilaksanakan di bulan Juli-September 2022, kemudian dilanjutkan tingkat kecamatan yang dilaksanakan mulai minggu ke-2 bulan Februari. Tahun 2023 terverifikasi sebanyak 135 usulan hasil musrenbang kecamatan yang telah terinput dalam SIPD yang diantaranya terdapat 32 Usulan yang menjadi prioritas kecamatan.

Untuk mengakomodir masukan dari para stakeholder pembangunan daerah, maka dilaksanakan Forum konsultasi public yang hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan Ranwal RKPD maupun renja PD. Agar dokumen perencanaan PD lebih terarah, maka dilaksanakan Forum PD/lintas PD untuk dokumen perencanaan PD.

Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan politik, anggota DPRD melakukan input usulan pikir melalui SIPD paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten, yang akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappeda serta SKPD teknis. Pokok-pokok pikiran DPRD nantinya akan disampaikan dalam pelaksanaan Musrenbang kabupaten.

Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan RKPD, yang membahas usulan hasil musrenbang kecamatan dan usulan pikir DPRD. Dokumen Rancangan RKPD yang telah mengakomodir hasil musrenbang kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD kemudian menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rancangan akhir renja PD. Setelah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan, selanjutnya dokumen rancangan akhir RKPD diajukan untuk dilakukan rewiu APIP oleh inspektorat untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.

Setelah itu diajukan fasilitasi ke provinsi melalui Bappeda provinsi. Hasil fasilitasi provinsi menjadi bahan masukan dan penyempurnaan dokumen rancangan akhir RKPD. Setelah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi, selanjutnya dokumen dapat ditetapkan sebagai perkara RKPD kabupaten. Perkada RKPD paling lambat ditetapkan paling lambat akhir bulan Juni atau selambat-lambatnya 1 minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.

b. Penyusunan Ranwal RPJPD

Sebelum penyusunan Ranwal RPJPD, kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap RPJMD untuk periode RPJPD 20 tahun sebelumnya. Hasil evaluasi RPJMD dikonsultasikan ke provinsi untuk mendapat masukan. Hasil evaluasi RPJMD akan menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJPD.

Proses penyusunan RPJPD diawali dengan penentuan isu strategis yang disusun berdasarkan permasalahan dihasilkan berdasarkan survei hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD untuk periode RPJPD sebelumnya. Kemudian dari isu strategis serta visi dan misi nasional, ditetapkan visi dan misi daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Setelah itu dari setiap misi disusun arah kebijakan per 5 tahun beserta sasaran pokok dan indikator kinerja dan target capaian.

Rancangan awal yang telah disusun kemudian dikonsultasikan ke DPRD untuk mendapatkan masukan dan menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Setelah itu dilakukan konsultasi ke provinsi untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.

1.2. Data dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Data Pembangunan Daerah

Pelaksanaan penyusunan data Pembangunan Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Bupati Sumenep. Data pembangunan yang di sajikan merupakan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang

beketerkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Bupati Sumenep. Pengumpulan data ini melalui monitoring langsung ke beberapa kecamatan untuk mendapat data potensi daerah yang kemudian di jadikan buku.

1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan DAK

Dalam penyusunan DAK BAPPEDA melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan OPD teknis dan BAPPENAS dalam rangka penyiapan dan penentuan Lokasi Prioritas DAK sesuai dengan tematik Tahunannya. Setelah Rapat koordinasi bersama OPD teknis dan BAPPENAS. BAPPEDA dan OPD teknis melaksanakan penginputan usulan di Aplikasi KRISNA-DAK, kemudian BAPPEDA melengkapi Laporan Realisasi Pelaksanaan DAK triwulanan sebagai kelengkapan dalam pemenuhan usulan DAK. Setelah fase penginputan usulan BAPPEDA berkoordinasi dengan OPD pengampu dalam menentukan urutan prioritas usulan. Setelah pengurutan prioritas kemudian dilaksanakan penguncian usulan (LOCK) agar usulan dapat di verifikasi oleh Provinsi dan K/L pengampu. Setelah tahap verifikasi kemudian tahap perbaikan dimana melaksanakan rapat koordinasi bersama OPD pengampu menyangkut apa saja perbaikan yang di perlukan. Setelah tahap tersebut dilakukan submit usulan agar usulan selanjutnya dapat diverifikasi oleh BAPPENAS, kemudian bappeda menyusun surat pengantar usulan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep. Setelah usulan telah di setuju maka dilaksanakan lah monitoring pelaksanaan DAK Fisik dan NonFisik yang dilakasnakan setiap 3 bulan (triwulan) yang kemudian dilaporkan kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan BAPPENAS.

b. Penyusunan Renja

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap 3 bulan (triwulan) setelah triwulan berakhir selambat-

lambatnya 14 hari kerja. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengukur kinerja OPD dalam pelaksanaan Rencana Kerjanya untuk mencapai target yang telah di tentukan. Dalam pelaksanaannya BAPPEDA Sumenep menggunakan aplikasi SIMPEL untuk mengukur Kinerja OPD per triwulan.

c. Penyusunan Hibah Bansos

Laporan evaluasi capaian kegiatan hibah dan bansos disusun pada akhir tahun anggaran, yang merangkum capaian evaluasi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan hibah dan bansos.

d. Penyusunan DK/TP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan, dan ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Bappeda melakukan evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan/ dekonsentrasi yang dilakukan oleh SKPD pengampu dan melaporkannya ke provinsi.

e. Penyusunan LKPJ

Dokumen LKPj merupakan dokumen evaluasi yang disusun setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen LKPj berisi kebijakan umum pelaksanaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta mencakup capaian kinerja utama daerah, kinerja ekonomi makro, kinerja perangkat daerah, kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Penyusunan LKPj ini mengompulir LKPj yang disusun oleh perangkat daerah. Selain

itu LKPj juga menyajikan Realisasi kinerja APBD serta realisasi anggaran setiap Perangkat Daerah. Setiap perangkat daerah menyusun dokumen LKPJ PD yang berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran selama satu tahun anggaran. Kemudian dokumen diupload ke dalam aplikasi "Dapur Data" untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh mitra pendamping Bappeda. Dokumen LKPj PD yang telah terverifikasi akan menjadi bahan penyusunan Dokumen LKPj kepala daerah.

2. Sasaran Strategis Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah, indikator Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja).

2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Asistensi Program, Indikator, dan Target Kinerja Organisasi Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketenteraman dan Ketertiban, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan dan Kearsipan sehingga tercapai keselarasan RKPd dengan RPJMD.

2.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Asistensi Program, Indikator, dan Target Kinerja Organisasi Perangkat Daerah urusan Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perikanan, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Ketenaga Kerjaan sehingga tercapai keselarasan RKPd dengan RPJMD.

2.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Asistensi Program, Indikator, dan Target Kinerja Organisasi Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan serta Lingkungan Hidup sehingga tercapai keselarasan RKPD dengan RPJMD.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah, indikator Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan.

3.1. Penyusunan Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Pada kegiatan ini difokuskan pada (1) peningkatan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan stakeholder penelitian dan (2) peningkatan publikasi hasil kajian melalui penerbitan Jurnal Karaton. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder Bidang Litbang Seperti Perguruan Tinggi, OPD dan masyarakat terlaksana dengan baik, khususnya Kerjasama dan komunikasi yang instensif dengan Perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep. Sementara Kerjasama dengan perguruan tinggi di madura dan Jawa Timur sudah sangat maksimal Dimana semua perguruan tinggi negeri telah bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan kegiatan kajian dan penelitian. Kunci keberhasilan Kerjasama yang harmonis tersebut karena adanya komunikasi aktif Bidang Litbang Bappeda dengan stakeholder lainnya serta komitmen yang baik pimpinan daerah di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan kegiatan penerbitan Jurnal karaton terlaksana 2 kali selama satu tahun anggaran yakni pada bulan Juli dan Desember 2023 baik secara online melalui link <http://bappeda.sumenepkab.go.id/jurnal/>. Keberhasilan penerbitan jurnal karaton karena adanya Kerjasama yang baik antara Bappeda dengan para ahli jurnal di Kabupaten Sumenep serta publikasi Call paper melalui media yang tersedia baik social maupun konvensional.

3.2. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan kajian sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, di bidang Sosial dan Kependudukan ada 12 tema kajian yakni : Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Sumenep, Survei Preferensi Masyarakat Terhadap Aspek Sosial, Politik dan Ekonomi Di Kabupaten Sumenep, Kajian Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Ngaji Di Kabupaten Sumenep, Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Di Kabupaten Sumenep, Studi Kelayakan Pendirian SMKN 2 Sumenep di Kecamatan Batuan, Analisis Perencanaan Karir Siswa Dalam Menanggulangi Fenomena Putus Sekolah Di Kabupaten Sumenep, Penyusunan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Sumenep Tahun 2022, Analisis Tipologi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) Kepulauan, Analisis Tiga Tahun Pemerintah Kabupaten Sumenep : Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2023, Penyusunan Indeks Kapasitas Organisasi (IKO) di Kabupaten Sumenep serta Kajian Nilai-nilai Permainan Tradisional Dalam Upaya Meningkatkan Toleransi dan Gotong Royong di Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan dimulai dengan Penetapan penyelenggara swakelola (Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas) pada bulan Januari 2023, Review Proposal dan RAB pada bulan Februari, Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak (PKS) Pelaksanaan Swakelola pada bulan Maret sesuai dengan durasi pekerjaan dimaksud, pelaksanaan Laporan pendahuluan dan laporan akhir (sesuai jadwal KAK). Hasil dari kajian dan penelitian selain dipublikasikan menjadi jurnal, juga diberikan kepada OPD teknis terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan di masing-masing OPD.

3.3. Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Kegiatan ini difokuskan pada

pelaksanaan kajian sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, di bidang Sosial dan Kependudukan ada 2 tema kajian yakni : Analisis Perencanaan Sub Sektor Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani Di Kabupaten Sumenep dan Pengembangan Produk Gula Siwalan Cair Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan dimulai dengan Penetapan penyelenggara swakelola (Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas) pada bulan Januari 2023, Review Proposal dan RAB pada bulan Februari, Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak (PKS) Pelaksanaan Swakelola pada bulan Maret sesuai dengan durasi pekerjaan dimaksud, pelaksanaan Laporan pendahuluan dan laporan akhir (sesuai jadwal KAK). Hasil dari kajian dan penelitian selain dipublikasikan menjadi jurnal, juga diberikan kepada OPD teknis terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan di masing-masing OPD.

- 3.4. Penyusunan Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Difokuskan pada dua kegiatan yakni Lomba Anugerah Inovasi Daerah dan Pelaksanaan Input data Innovative Government Award (IGA) Kemendagri Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan IGA Tahun 2023 dilaksanakan dengan melakukan 4 kali bimbingan teknis kepada OPD, Puskesmas dan instansi lainnya pada bulan Juli 2023. Sementara input data dilakukan masing-masing OPD/instansi pada bulan Juli-September 2023. Pada tahun 2023 nilai Indeks Inovasi daerah Kabupaten Sumenep sebesar 43,23 atau dibawah target RPJMD sebesar 51,38. Kendala turunnya Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yakni : a) menurunnya inovasi baru di OPD dan puskesmas b). keterbatasan SDM yang mengelola inovasi OPD/puskesmas.

Sementara itu, lomba Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan dimaksud.

3.1.6. Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Untuk keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam pencapaian program dan kegiatan, pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	
1.1				<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	100	
1.1.1				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.2				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.3				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.4				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.5				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.6				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.7				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	Menunjang
1.2				<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	100	
1.2.1				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
1.2.2				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					SKPD		
1.2.3				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	Menunjang
1.3				<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah ASN yang Disiplin	100	
1.3.1				Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	Menunjang
1.3.2				Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang
1.4				<i>Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	100	
1.4.1				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.4.2				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.4.3				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.4.4				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
1.4.5				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	Menunjang
1.4.6				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
1.4.7				Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Menunjang
1.5				<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	100	
1.5.1				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.6				<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	100	
1.6.1				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	100	Menunjang
1.7				<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100	
1.7.1				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang
1.7.2				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang
1.7.3				Sub kegiatan Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	97,62	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	100	
2.1				<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	100	
2.1.1				Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100	Menunjang
2.1.2				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100	Menunjang
2.1.3				Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	Menunjang
2.1.4				Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100	Menunjang
2.1.5				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
2.2				<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	100	
2.2.1				Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	Menunjang
2.2.2				Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100	Menunjang
2.3				<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	
2.3.1				Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100	Menunjang
2.3.2				Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100	Menunjang
3	Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	101,84	Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100	
3.1				<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	100	
3.1.1				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	Menunjang
3.1.2				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100	Menunjang
3.1.3				Sub kegiatan	Jumlah Laporan	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
3.1.4				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	Menunjang
3.1.5				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100	Menunjang
3.1.6				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100	Menunjang
3.2				<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	
3.2.1				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	Menunjang
3.2.2				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	100	Menunjang
3.2.3				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
3.2.4				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	Menunjang
3.2.5				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	100	Menunjang
3.2.6				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	100	Menunjang
3.3				<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	100	
3.3.1				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100	Menunjang
3.3.2				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	100	Menunjang
3.3.3				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	100	Menunjang
3.3.4				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	100	Menunjang
3.3.5				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	100	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
3.3.6				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100	Menunjang
3.3.7				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100	Menunjang
4	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	104	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100	
4.1				<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	100	
4.1.1				Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100	Menunjang
4.1.2				Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	100	Menunjang
4.2				<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	100	
4.2.1				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100	Menunjang
4.2.2				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100	Menunjang
4.2.3				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	100	Menunjang
4.3				<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
4.3.1				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100	Menunjang
4.4				<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	100	
4.4.1				Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	100	Menunjang
4.4.2				Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.257.471.893	7.583.967.411	91,84
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11.727.100	11.273.700	96,13
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.572.300	2.486.000	96,65
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.022.400	947.000	92,63
1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	931.500	919.900	98,75
1.1.4	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	931.500	914.900	98,22
1.1.5	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	931.500	923.900	99,18
1.1.6	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.638.000	1.425.000	87,00
1.1.7	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.699.900	3.657.000	98,84
1.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6.312.954.901	5.698.293.482	90,26
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.299.013.661	5.686.137.482	90,27
1.2.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.912.320	1.911.000	99,93
1.2.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.028.920	10.245.000	85,17

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	% Capaian
1.3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	197.918.050	197.003.738	99,54
1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.918.050	31.808.000	99,66
1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	166.000.000	165.195.738	99,52
1.4	<i>Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	978.012.312	960.421.353	98,20
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.293.596	21.264.000	99,86
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.139.090	50.999.070	99,73
1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	411.049.938	397.308.575	96,66
1.4.4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.065.594	21.878.000	99,15
1.4.5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	321.679.000	320.361.550	99,59
1.4.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.770.000	136.610.158	98,44
1.4.7	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.015.094	12.000.000	99,87
1.5	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	27.805.187	27.800.000	99,98
1.5.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.805.187	27.800.000	99,98
1.6	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	232.884.550	198.139.083	85,08
1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.884.550	198.139.083	85,08
1.7	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	496.169.793	491.036.055	98,97
1.7.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.341.090	211.269.056	99,97
1.7.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.527.487	63.769.000	98,82
1.7.3	Sub kegiatan Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.301.216	215.997.999	98,05
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.381.234.044	1.259.212.175	91,17
2.1	<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	604.618.150	535.992.823	88,65
2.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	22.006.050	11.499.000	52,25
2.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.975.150	6.170.000	77,37
2.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	21.917.200	18.129.000	82,72
2.1.4	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	30.372.400	28.110.000	92,55
2.1.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	522.347.350	472.084.823	90,38
2.2	<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	72.531.994	54.377.354	74,97
2.2.1	Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	52.414.694	42.005.229	80,14
2.2.2	Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.117.300	12.372.125	61,50
2.3	<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	704.083.900	668.841.998	94,99
2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	81.339.600	57.160.848	70,27
2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	622.744.300	611.681.150	98,22
3	Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	562.877.292	487.787.103	86,66
3.1	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	171.866.578	124.033.100	72,17

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	% Capaian
3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.718.394	47.122.000	83,08
3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.238.750	11.710.000	48,31
3.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.164.420	1.785.000	34,56
3.1.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.090.494	48.020.100	87,17
3.1.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.397.500	14.113.000	55,57
3.1.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.257.020	1.283.000	24,41
3.2	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	141.962.188	137.142.000	96,60
3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.172.394	29.126.000	99,84
3.2.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.245.900	19.854.500	81,89
3.2.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.809.500	2.780.000	98,95
3.2.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.834.994	40.760.500	99,82
3.2.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	23.499.600	23.264.000	99,00
3.2.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.399.800	21.357.000	99,80
3.3	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	249.048.526	226.612.003	90,99
3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35.975.750	35.689.300	99,20
3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.006.988	82.875.803	94,17
3.3.3	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	17.301.800	8.957.000	51,77
3.3.4	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.956.300	1.289.000	32,58
3.3.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.550.688	80.189.400	97,14
3.3.6	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.300.800	16.340.000	94,45
3.3.7	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.956.200	1.271.500	32,14
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.146.096.944	1.128.926.397	98,50
4.1	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	164.820.497	156.198.397	94,77
4.1.1	Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	112.546.897	106.933.397	95,01
4.1.2	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	52.273.600	49.265.000	94,24
4.2	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	807.361.000	801.891.000	99,32

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	% Capaian
4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	354.361.000	352.530.000	99,48
4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	51.500.000	50.175.000	97,43
4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	401.500.000	399.186.000	99,42
4.3	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	151.350.000	150.730.000	99,59
4.3.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	151.350.000	150.730.000	99,59
4.4	<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	22.565.447	20.107.000	89,11
4.4.1	Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8.157.547	7.564.000	92,72
4.4.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	14.407.900	12.543.000	87,06

Uraian Penjelasan Realisasi Anggaran:

1. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibanding Pendapatan Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00. Realisasi Total Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00.
2. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 11.347.680.173,00 Meningkat sebesar Rp. 711.488.645,00 atau 6,69 % dibanding Belanja Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.10.636.191.528,00 Realisasi Total Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.459.893.086,00 atau 92,18 % sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 887.787.087,00.
 - Belanja Operasi
Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 11.139.624.084,00 terealisasi sebesar Rp. 10.252.095.087,00 atau sebesar 92,03 % sehingga masih terdapat sisa target sebesar Rp.887.528.997,00
 - Belanja Modal
Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 208.056.089,00 terealisasi sebesar Rp. 207.797.999,00 atau sebesar 99,88 % sehingga terdapat sisa target sebesar Rp.258.090,00.
 - Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00% sehingga masih terdapat sisa target sebesar Rp. 0,00.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

➤ Hambatan dan kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

- Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang;
- Masih kurang respon SKPD terhadap pentingnya kebutuhan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
- Belum ada standar baku terhadap tahapan penyusunan data mulaidari proses pengumpulan sampai dengan pengolahan dan publikasi data.

➤ Solusi

Untuk mengatasi hambatan dan kendala ini adalah :

- Melakukan peningkatan SDM baik masyarakat maupun aparat serta pelibatan lebih banyak unsur-unsur di luar pemerintah seperti tokoh-tokoh masyarakat dan LSM dalam proses perencanaan;
- Meningkatkan pemahaman aparat tentang pentingnya data, sehingga kedepan data yang disajikan oleh masing-masing SKPD adalah data yang valid dan berkualitas;

Perlu disusun SOP berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait tahapan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memudahkan SKPD dalam menyusun data hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome)	Program/ Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	8.257.471.893	7.583.967.411	91,84	8,16
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	84	82	97,62	1.381.234.044	1.259.212.175	91,17	6,45
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RRPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	87	88,6	101,84	562.877.292	487.787.103	86,66	15,18
4	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	%	75	75	100	1.146.096.944	1.128.926.397	98,50	1,50

Tabel 3.3.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	100	8.257.471.893	7.583.967.411	91,84	8,16
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dok	14	14	100	11.727.100	11.273.700	96,13	3,87
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	Dok	3	3	100	2.572.300	2.486.000	96,65	3,35
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dok	1	1	100	1.022.400	947.000	92,63	7,37
1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dok	1	1	100	931.500	919.900	98,75	1,25
1.1.4	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dok	1	1	100	931.500	914.900	98,22	1,78
1.1.5	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dok	1	1	100	931.500	923.900	99,18	0,82
1.1.6	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Lap	3	3	100	1.638.000	1.425.000	87,00	13,00
1.1.7	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Lap	4	4	100	3.699.900	3.657.000	98,84	1,16
1.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	Dok	3	3	100	6.312.954.901	5.698.293.482	90,26	9,74

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS/ Bulan	54	54	100	6.299.013.661	5.686.137.482	90,27	9,73
1.2.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	100	1.912.320	1.911.000	99,93	0,07
1.2.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	2	2	100	12.028.920	10.245.000	85,17	14,83
1.3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah ASN yang Disiplin	ASN	54	54	100	197.918.050	197.003.738	99,54	0,46
1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100	31.918.050	31.808.000	99,66	0,34
1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100	166.000.000	165.195.738	99,52	0,48
1.4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	Lap	6	6	100	978.012.312	960.421.353	98,20	1,80
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	21.293.596	21.264.000	99,86	0,14
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	51.139.090	50.999.070	99,73	0,27
1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	411.049.938	397.308.575	96,66	3,34
1.4.4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100	22.065.594	21.878.000	99,15	0,85
1.4.5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	15	15	100	321.679.000	320.361.550	99,59	0,41
1.4.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	120	120	100	138.770.000	136.610.158	98,44	1,56
1.4.7	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	1	100	12.015.094	12.000.000	99,87	0,13
1.5	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	Lap	1	1	100	27.805.187	27.800.000	99,98134521	0,02
1.5.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100	27.805.187	27.800.000	99,98	0,02
1.6	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Lap	3	3	100	232.884.550	198.139.083	85,08	14,92
1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Lap	3	3	100	232.884.550	198.139.083	85,08	14,92
1.7	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Lap	1	1	100	496.169.793	491.036.055	98,97	1,03

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.7.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29	100	211.341.090	211.269.056	99,97	0,03
1.7.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	38	100	64.527.487	63.769.000	98,82	1,18
1.7.3	Sub kegiatan Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100	220.301.216	215.997.999	98,05	1,95
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	%	100	100	100	1.381.234.044	1.259.212.175	91,17	8,83
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Dok	3	3	100	604.618.150	535.992.823	88,65	11,35
2.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	2	2	100	22.006.050	11.499.000	52,25	47,75
2.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BA	1	1	100	7.975.150	6.170.000	77,37	22,63
2.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BA	1	1	100	21.917.200	18.129.000	82,72	17,28
2.1.4	Sub kegiatan Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	135	135	100	30.372.400	28.110.000	92,55	7,45
2.1.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dok	3	3	100	522.347.350	472.084.823	90,38	9,62
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	Dok	1	1	100	72.531.994	54.377.354	74,97	25,03
2.2.1	Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	51	51	100	52.414.694	42.005.229	80,14	19,86
2.2.2	Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100	20.117.300	12.372.125	61,50	38,50
2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lap	14	14	100	704.083.900	668.841.998	94,99	5,01
2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Lap	13	13	100	81.339.600	57.160.848	70,27	29,73
2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lap	1	1	100	622.744.300	611.681.150	98,22	1,78

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
3	Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	562.877.292	487.787.103	86,66	13,34
3.1	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	Dok	2	2	100	171.866.578	124.033.100	72,17	27,83
3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	100	56.718.394	47.122.000	83,08	16,92
3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PD	4	4	100	24.238.750	11.710.000	48,31	51,69
3.1.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lap	1	1	100	5.164.420	1.785.000	34,56	65,44
3.1.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	100	55.090.494	48.020.100	87,17	12,83
3.1.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD	4	4	100	25.397.500	14.113.000	55,57	44,43
3.1.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD	4	4	100	5.257.020	1.283.000	24,41	75,59
3.2	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dok	2	2	100	141.962.188	137.142.000	96,60	3,40
3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	100	29.172.394	29.126.000	99,84	0,16
3.2.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	PD	2	2	100	24.245.900	19.854.500	81,89	18,11

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
3.2.3	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	PD	2	2	100	2.809.500	2.780.000	98,95	1,05
3.2.4	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dok	1	1	100	40.834.994	40.760.500	99,82	0,18
3.2.5	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	PD	2	2	100	23.499.600	23.264.000	99,00	1,00
3.2.6	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	PD	3	3	100	21.399.800	21.357.000	99,80	0,20
3.3	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah disusun tepat waktu	Lap	2	2	100	249.048.526	226.612.003	90,99	9,01
3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	100	35.975.750	35.689.300	99,20	0,80
3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah yang disusun	Dok	1	1	100	88.006.988	82.875.803	94,17	5,83
3.3.3	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	PD	2	2	100	17.301.800	8.957.000	51,77	48,23
3.3.4	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	PD	2	2	100	3.956.300	1.289.000	32,58	67,42
3.3.5	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dok	1	1	100	82.550.688	80.189.400	97,14	2,86
3.3.6	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	1	1	100	17.300.800	16.340.000	94,45	5,55

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / sub kegiatan (out put)	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	
3.3.7	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	1	1	100	3.956.200	1.271.500	32,14	67,86
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	1.146.096.944	1.128.926.397	98,50	1,50
4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	Lap	2	2	100	164.820.497	156.198.397	94,77	5,23
4.1.1	Sub kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lap	1	1	100	112.546.897	106.933.397	95,01	4,99
4.1.2	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Lap	1	1	100	52.273.600	49.265.000	94,24	5,76
4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	Kajian	12	12	100	807.361.000	801.891.000	99,32	0,68
4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dok	5	5	100	354.361.000	352.530.000	99,48	0,52
4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dok	1	1	100	51.500.000	50.175.000	97,43	2,57
4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dok	6	6	100	401.500.000	399.186.000	99,42	0,58
4.3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	Kajian	2	2	100	151.350.000	150.730.000	99,59	0,41
4.3.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dok	2	2	100	151.350.000	150.730.000	99,59	0,41
4.4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	Lap	2	2	100	22.565.447	20.107.000	89,11	10,89
4.4.1	Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	Lap	1	1	100	8.157.547	7.564.000	92,72	7,28
4.4.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lap	1	1	100	14.407.900	12.543.000	87,06	12,94

Uraian Penjelasan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada

pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sumenep terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Persentase Capaian Kinerja (PD) Persentase Target Tahunan yang sesuai ketentuan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 91,84%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 8,16%;
2. Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai dengan capaian kinerja 97,62% dan capaian anggaran 91,17%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 6,45%;
3. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja) dengan capaian kinerja 101,84% dan capaian anggaran 86,66%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 15,18%;
4. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 98,50%, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 1,50%.

BAB IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun mendatang.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis sasaran strategis pertama *Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai*, realisasi kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 82% dari target sebesar 84% dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 dari 32 indikator 6 indikator prioritas pembangunan daerah capaiannya masih kurang dari 100%.
2. Analisis sasaran strategis kedua *Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah*, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)*, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebesar 88,6% dari target sebesar 87%.
3. Analisis sasaran strategis ketiga *Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah*, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *ersentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan*, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebesar 75% dari sebesar 75%.

4. Realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu rata-rata sebesar 99,86%, dengan efisiensi anggaran sebesar 7,82%.
5. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Sepanjang tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik.
3. BAPPEDA Kabupaten Sumenep juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. (0328) 666923
SUMENEP

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 072 /435.202/2023

TENTANG
TIM INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG TIM INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP.

Pertama : Membentuk Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Internal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian

- kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 19 Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si

Pejabat Utama Muda

Nip. 19660129 198903 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 188/ 072/435.202/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

SUSUNAN TIM INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggungjawab	Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep
II	Ketua	Sekretaris Bappeda Kab. Sumenep
III	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan
IV	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal: 19 Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tabel 4.2 (T-C.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% capaian sasaran pemkab + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Bobot Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep	1. Perencanaan Kinerja (30%) 1. Perencanaan Strategis (10%) - Pemenuhan Renstra (2%) - Kualitas Renstra (5%) - Implementasi Renstra (3%) 2. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) - Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) - Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) - Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	23	24	25	26	27
			Nilai Bobot Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep	2. Pengukuran Kinerja (25%) 1. Pemenuhan Pengukuran (5%) 2. Kualitas Pengukuran (12,5%) 3. Implementasi Pengukuran (7,5%)	19	20	21	22	23
1.2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RKPD ----- X 100% Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RPJMD	86%	87%	88%	89%	90%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. 666923
SUMENEP

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 2663 /435.202/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

- Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Desember 2023



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..
4. Indikator Kinerja Utama :
 1. Nilai Bobot Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep;
 2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja);
 3. Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA.

TABEL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IMPACT)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (PROGRAM)	FORMULA	KET
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Bobot Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep			Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% Capaian sasaran pemkab + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian program Perangkat Daerah 1. Perencanaan Kinerja (30%) 1. Perencanaan Strategis (10%) - Pemenuhan Renstra (2%) - Kualitas Renstra (5%) - Implementasi Renstra (3%) 2. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) - Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) - Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) - Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	
1.1.				Nilai Bobot Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep	Meningkatnya Konsistensi Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		2. Pengukuran Kinerja (25%) 1. Pemenuhan Pengukuran (5%) 2. Kualitas Pengukuran (12,5%) 3. Implementasi Pengukuran (7,5%) Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah sesuai regulasi ----- X 100% Jumlah Dokumen Perencanaan	
1.1.1.							Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai ----- X 100%	
1.2.			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)			Jumlah Program Prioritas OPD yang Tercapai ----- X 100% Jumlah seluruh program prioritas OPD	
1.2.1.					Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah		Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RKPD ----- X 100% Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RPJMD Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja ----- 100% Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra OPD	

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IMPACT)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (PROGRAM)	FORMULA	KET
3.1.			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA			$\frac{\text{Jumlah Capaian kinerja selain indikator rata-rata capaian kinerja}}{\text{Jumlah indikator selain indikator rata-rata capaian kinerja}} \times 100\%$	
3.1.1.					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	$\frac{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun berkenaan}} \times 100\%$	

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Desember 2023



Drs. YAYAK MURWAHYUDI, MSi.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Sumenep

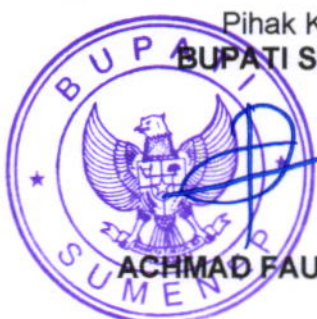
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila target kinerja dimaksud tidak tercapai karena bukan faktor eksternal, maka kami bersedia dimutasi.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, **25** Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP**

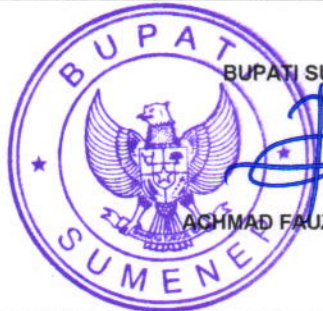



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1 Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	84%
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2 Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	87%
3	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3 Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.4 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.664.949.609	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.457.291.444	APBD
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 660.258.442	APBD
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 934.182.944	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 10.716.682.439	


BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Sumenep, 26 Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP
Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660729-1989031007